

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya bargaining (posisi tawar) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian tersebut merupakan pengertian kemiskinan secara luas. Telah dikatakan bahwa kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup, artinya bahwa orang yang miskin itu hidupnya hampir selalu dan sering tidak nyaman. Dalam segala bidang mereka selalu menjadi kaum tersingkir, karena mereka tidak dapat menyamakan kondisi mereka dengan kondisi masyarakat sekelilingnya.¹ Kemiskinan juga menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut.

Menurut Chambers (Makmun, 2003) kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of*

emergency), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. 1 Definisi menurut Cahyat, kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu: 1) Kemiskinan absolut Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1/hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2/hari. 2) Kemiskinan relatif Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan.³ b. Penyebab kemiskinan Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi, penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah: 1) Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya

sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya. 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.

Selain itu Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negaranegara berkembang diakibatkan karena interaksi antara 6 karakteristik berikut yaitu:

- 1) Tingkat pendapatan nasional di negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- 2) Pendapatan per kapita di negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- 3) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- 4) Mayoritas penduduk di negara berkembang harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan

yang ada di negara maju.

- 6) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan dan kurang memadai.

Sementara itu menurut Sharp, et.al (1996: 173-191) dalam Mudrajat (2006:120) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi :

- 1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.
- 3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya

pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

2.1.2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Suwadi, (2014:25) Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu Kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
- b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
- c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

2.1.3. Program Bedah Rumah

Rumah Layak Huni merupakan rumah untuk tinggal dengan nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Namun, karena

keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya warga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni. Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah Keluarga/ rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp. 1,5 juta pertahun.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011) Bedah Rumah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Program Bedah Rumah adalah program yang ditujukan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. Untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel dan mempercepat penyampaian permohonan bantuan stimulant perumahan swadaya kepada Menteri, perlu memfungsikan UPK/BKM; agar pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan, obyek bantuan, dan

kabupaten/kota yang jelas dan tegas.

2.1.4. Syarat Mendapat Bedah Rumah

Kriteria penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/prt/m/2016:

- a. WNI yang sudah berkeluarga
- b. Memiliki atau menguasai tanah
 - Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan)
 - Tidak dalam sengketa
 - Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
- d. Belum pernah memperoleh BSPS
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai UMP setempat
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
- g. Bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang
- h. Bersedia membuat pernyataan

2.1.5. Tahapan Program Bedah Rumah dari Pemerintah, antara lain:

1. Pengusulan lokasi bedah rumah (dilihat dari tingkat kemiskinan daerah atau provinsi)
2. Penetapan lokasi
3. Penyiapan masyarakat
4. Penetapan calon penerima bedah rumah
5. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bedah rumah bentuk uang
6. Pengadaan dan penyerahan bedah rumah bentuk barang
7. Pelaporan.

2.1.6. Cara Daftar Memperoleh Bantuan Bedah Rumah

- a. Mengajukan permohonan ke Kepala Desa
- b. Nanti akan dikoordinir oleh Bupati
- c. Kemudian akan didata secara keseluruhan jumlah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan
- d. Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit rumah per desa atau kelurahan
- e. Calon penerima bedah rumah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh KPA atau Kepala Satker sebagai penerima bedah rumah
- f. Dana bantuan bedah rumah akan dicairkan melalui bank atau melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2.2. Teori Kesejahteraan Sosial

2.2.1. Definisi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki arti terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial yang disahkan pada 18 Desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap Undang-undang No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*), dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Definisi Kesejahteraan sosial lainnya adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama yaitu.

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.
- 2) Kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya dan lain sebagainya.

2.2.2. Kondisi Sejahtera

Sejahtera merujuk ke keadaan sosial yang lebih baik, seperti kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda, namun dalam kebijakan sosial merujuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Midgley (2004), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “... *a condition or state of human well-being.*” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karna kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.

Kesejahteraan sosial menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006:5) Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat.

James Midley dalam buku *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial* yang di tulis oleh Miftahul Huda mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus dimiliki 3 syarat utama yaitu,

- 1) Masalah sosial yang dapat dimenej dengan baik.
- 2) Setiap individu, keluarga kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.
- 3) Peluang-peluang sosial yang terbuka secara maksimal.

2.2.3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas dkk. Menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh:

- 1) Terentasnya kemiskinan.
- 2) Tingkat kesehatan yang lebih baik.
- 3) Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktifitas masyarakat.

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu adat istiadat, keadaan iklim dan keadaan sekitar serta ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak.

Ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Seperti ada sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Teori kesejahteraan sosial ini peneliti gunakan untuk menganalisis dampak yang ditinjau menggunakan indikator kesejahteraan sosial. Selain itu juga peneliti

menganalisis defenisi kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus memiliki syarat utama yaitu: keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kebijakan seperti Pendapatan, Jaminan Sosial, Kesehatan, perumahan dan Pendidikan.

2.3. Penelitian Relevan

Penelitian relevan pertama yang peneliti gunakan sebagai perbandingan pada penulisan ini adalah penelitian milik Heni Widiyawati dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak adanya program bedah rumah bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Hargorejo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulun Progo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya program bedah rumah yang diperuntukkan dalam ketegori yang telah ditentukan sangat membantu mereka, tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat miskin, karena Program Bedah Rumah ini selain membantu meringankan beban anggaran untuk pembangunan rumah masyarakat miskin, juga menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan yang bisa dibilang cukup berhasil.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa

Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya” dalam penelitian ini ditemukan identifikasi dampak dari pada pelaksanaan program bedah rumah yakni sebagai berikut; *pertama* Bagaimana kondisi rumah masyarakat yang mendapatkan BSPS di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Kedua* Bagaimana kriteria masyarakat penerima BSPS dengan di kategorikan RTLH di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Sehingga fokus penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang mendapatkan bantuan bedah rumah atau BSPS. Dengan menggunakan teori James Midley dalam buku *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*.

Penelitian ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan sumber yang telah didapat melalui observasi dimana pada awal penelitian langsung dilapangan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat. Adapun hasil observasinya adalah menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan bedah rumah tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dan menerangkan berbagai komponen tentang kondisi masyarakat setelah mendapatkan bedah rumah.

Gambar 2.1
ALUR PIKIR PENELITIAN

Pelaksanaan Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Didesa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

